

ELECTRONIC COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Abdul Khair

Dosen Jurusan Syariah STAIN Palangkaraya

ABSTRAK

Elektronik Commerce adalah transaksi perdagangan dengan menggunakan internet, cara ini banyak kemudahannya sebab para pihak yang mengadakan kontrak tidak perlu bertemu muka sehingga dapat menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Walaupun banyak kemudahan, namun cara ini juga ada kelemahan-kelemahannya, seperti rentan terjadi penipuan, identitas para pihak dapat dipalsukan, kerahasiaan kurang terjamin, keabsahan data sering diragukan. Pada tulisan ini penulis berusaha mencari solusi agar transaksi ini menjadi aman, terutama perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan kontrak dengan cara *e-commerce*.

Kata Kunci: Transaksi Elektronik, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

E- Commerce is trade transaction using internet, this means a lot of simplicity because the parties entered into the contract does not need to meet face so it can save time and can be done anytime and anywhere. Although a lot of convenience, but this way there are also its weaknesses, such as susceptible to fraud, identity of the parties can be forged, confidentiality is less reliable, the validity of data is often questionable. In this paper the authors tried to find a solution to this transaction to be safe, especially legal protection for the parties who entered into a contract by e-commerce.

Keywords: Electronic Transactions, Law Protection

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini banyak bidang mengalami perubahan, salah satunya adalah dunia perdagangan. Kalau biasanya antara penjual dan pembeli harus bertemu untuk melakukan transaksi, sekarang jual beli tidak mesti bertemu lagi antara penjual dan pembeli. Penjual dapat menjajakan dagangannya melalui internet, dan pembelipun dapat melihat dan memilih barang dalam kamarnya sendiri sambil membuka internet.

Penggunaan internet berkembang pesat sejak ditemukan internet tersebut. Teknologi internet memungkinkan koneksi terjadi diantara berbagai jenis komputer, antar berbagai sistem operasi. Tidak ada jaringan yang terlalu cepat atau lamban, terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak bisa dikoneksikan. Internet dapat menghubungkan jaringan-jaringan canggih yang merentang antar benua

dan menghubungkan ribuan, bahkan jutaan computer.¹

Perkembangan teknologi komunikasi yang cepat ini dapat berpengaruh terhadap perubahan kultur masyarakat. Bahkan terbentuk dunia baru yang lazim disebut dunia maya, di dunia ini setiap orang dapat berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun. Memang dari sekian banyak aspek kehidupan manusia yang terkena dampak dunia maya ini adalah aspek bisnis. Bisnis dengan media elektronik atau yang biasa disebut *Elektronik Commerce* atau yang lebih dikenal *e-commerce*, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan berbagai transaksi.

Jual beli atau perdagangan melalui transaksi elektronik merupakan suatu pilihan bisnis yang sangat menjanjikan untuk diterapkan saat ini, karena jual beli melalui transaksi elektronik memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli di dalam melakukan transaksi, meskipun para pihak berada di dua tempat yang berbeda.

Untuk mengantisipasi permasalahan dalam *e-commerce* ini, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati sebuah Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang mulai berlaku tanggal 12 April 2008. Undang-undang ini mencakup segala pranata hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian *virtual* ini, maka secara

otomatis perjanjian-perjanjian tersebut di internet tunduk pada UUITE dan hukum perjanjian yang berlaku. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak terlibat.

Pada Hukum perdata ada juga mengatur masalah perjanjian yaitu pada pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif.² Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya perjanjian mutlak harus dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Namun demikian, dalam praktiknya *e-commerce* sering menimbulkan permasalahan karena dapat menimbulkan kesamaran yang dapat mengakibatkan ketidakpastian. Objek jual beli yang tidak nyata serta kurangnya informasi mengenai barang yang diperjualbelikan lazim terjadi pada *e-commerce*. Jual beli yang mengandung unsur kesamaran ini mengandung permainan atau untung-untungan, meragukan dan mengandung unsur penipuan³ Jual beli seperti ini tidak

¹ Adi Nograho, *Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, (Informatika: Bandung, 2006), hlm. 26

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 2001), hlm. 16

³ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2004), hlm. 87

jarang menimbulkan penyesalan pada pembeli yang disebabkan karena adanya kecacatan atau ketidaksempurnaan pada objek yang diperjualbelikan.

B. Pengertian E-commerce

Ada beberapa definisi dari *E-commerce* yang dikemukakan oleh para sarjana, David Buam yang dikutip oleh Onno W. Purbu menyebutkan *e-commerce* adalah “*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services, and information*” (*E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁴

Bryan A. Garner, sebagaimana dikutip oleh Barakatullah dalam bukunya *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia*, mengatakan adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan komputer *online* di internet.⁵

E-Commerce menurut Munir Fuady, adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan

pertukaran/penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik.⁶

Dari berbagai pendapat itu, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik atau *e-commerce* itu adalah transaksi melalui internet.

C. Asas-asas Perjanjian Jual-Beli

Pada hukum perdata ada diatur tentang asas-asas perjanjian jual-beli, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak.

Maksud asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang dapat melakukan perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1338 (1) KUHPdata yang berbunyi “Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Buku III KUHPdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkret, namun tetap sesuai dengan asas syarat perjanjian, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak. Pada pasal 1320 KUHPdata menegaskan bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan.

⁴ Onno W. Purba, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2000), hlm. 2

⁵ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12

⁶ Anwar Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 407

3. Asas Itikad Baik.

Asas itikad baik terbagi menjadi 2, yaitu dalam pengertian subyektif dan dalam pengertian obyektif. Dalam pengertian subyektif adalah kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian obyektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Itikad baik ini tidak sama dengan niat, itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut dan layak

4. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan yaitu para pihak yang membuat perjanjian harus menumbuhkan kepercayaan diantara mereka, dengan kata lain harus memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, karena keraguan akan mengganggu prestasi para pihak.

5. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat ini diatur dalam pasal 1338 (1) KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga tidak ada alasan bagi para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan prestasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan ini disebut wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut kerugian atas tidak terlaksananya

prestasi tersebut, baik melalui prose pengadilan ataupun melalui proses mediasi.

6. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam setiap perjanjian, karena kepastian hukum akan menimbulkan rasa kepuasan bagi para pihak.

7. Asas Kepatutan

Maksudnya adalah isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana diatur dalam pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

8. Asas Kebiasaan

Maksudnya adalah perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, hal ini sesuai dengan pasal 1347 KUHPerdata yang berbunyi: "Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan". Ketentuan ini merupakan perwujudan dari unsur naturalisme dalam sebuah perjanjian.

D. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) Cakap untuk membuat perjanjian, (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal.

Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Maksudnya adalah dalam melakukan perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan. Tidak ada paksaan artinya adalah tidak ada unsur yang menakutkan dalam perjanjian tersebut baik terhadap dirinya maupun hartanya. Tidak ada kekhilafan artinya adalah ketika melakukan perjanjian tersebut tidak ada dipengaruhi pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. Sedangkan unsur penipuan diatur dalam pasal 1328 KUHPerdota yaitu suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian yang bersangkutan, dan seandainya tidak ada unsur penipuan ini (dalam keadaan normal) maka pihak lain tidak akan bersedia menandatangani perjanjian.

Kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya itu, harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatannya itu.⁷ Sedangkan bila dilihat dari sudut ketertiban umum maka oleh karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah seharusnya orang tersebut sungguh-

sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.⁸

Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

Ketiga, Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 BW barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, barang yang belum ada yang dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian mutlak (*absolut*) dan bisa dalam pengertian relatif (*nisbi*). Belum ada dalam pengertian mutlak misalnya perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga. Sedangkan belum ada dalam pengertian relatif misalnya perjanjian jual beli beras, beras yang diperjual-belikan sudah berwujud beras, tetapi pada saat perjanjian diadakan masih milik orang lain namun akan menjadi miliknya penjual.⁹

Pasal 1334 ayat (2) BW barang-barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan obyek suatu perjanjian, kendatipun hal itu dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan itu. Adanya larangan ini karena menjadikan barang yang akan diwarisi

⁸ Ichsan, 1967, hlm. 126

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung:Sumur, 1973), hlm. 28

⁷ Subekti, 1979, hlm. 13

sebagai obyek perjanjian bertentangan dengan kesusilaan.

Keempat, Suatu sebab yang halal. Suatu sebab halal merupakan syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Ternyata pembentuk undang-undang membayangkan 3 macam perjanjian mungkin terjadi yakni : (1) perjanjian yang tanpa sebab, (2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan (3) perjanjian dengan suatu sebab yang halal. Akhirnya pasal 1337 BW menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada kenyataannya, ada perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara keseluruhan, misalnya unsur kesepakatan sebagai persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga maknanya mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya. Misalnya muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana isinya hanya merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti ini dikenal dengan perjanjian baku (*standard of contract*).

Menurut R. Subekti,¹⁰ pada dasarnya perjanjian atau jual beli harus memenuhi beberapa unsur yaitu: *Pertama*, Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.

Unsur *accedentialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi "barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi". *Kedua*, Unsur *esentialia*, yaitu sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian.

E. Proses Jual Beli dengan Internet

Untuk melakukan jual beli dengan internet ada beberapa proses yang harus dilakukan, untuk lebih jelasnya berikut akan dipaparkan proses tersebut, yaitu:¹¹

Pertama, penawaran yang dilakukan oleh penjual melalui *website* pada internet. Penjual menyediakan *storefront* yang berisi katalog dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang akan memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual.

Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

Kedua, penerimaan. Apabila penawaran dilakukan *e-mail address*,

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 20

¹¹ Edmon Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 82

maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Sedangkan penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.

Apabila ada yang berminat membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya.

Ketiga, tahap pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:¹²

- a) Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang melibatkan finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* yang akan melakukan pengebilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing.
- b) Pembayaran dua pihak tanpa perantara, dapat dilakukan secara

langsung tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya.

- c) Pembayaran dengan perantara pihak ke tiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain dengan menggunakan sistem pembayaran melalui kartu kredit *online* serta sistem pembayaran *check in line*.

Apabila kedudukan penjual dan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dan pembeli walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

- d) Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas jauh lebih mudah daripada transaksi yang dilakukan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, karena memerlukan waktu dan tenaga.

¹² Edmon Makarin, *Kompilasi ...*, hlm. 10

Traksaksi elektronik dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sepanjang si calon pembeli membuka internet.

F. Kandala-kandala Elektronik Commerce

Walaupun *E-commerce* banyak memberikan kemudahan kepada penggunaanya, akan tetapi disisi lain ada juga kandala-kandalanya, baik dari sisi hukum maupun dari sisi teknologi. Adapun kandala-kandala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecakapan para pihak.

Salah satu syarat dalam melakukan perjanjian jual beli adalah para pihak harus sudah cakap atau dewasa, apalagi jika barang yang diperjualbelikan tersebut bernilai besar. Dalam hal praktik kontrak *e-commerce* sulit untuk diketahui kecakapan para pihak, karena kontrak tersebut dilakukan melalui internet dalam dunia maya yang tidak mempertemukan para pihaknya secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya penipuan.

Hal ini tentu saja menjadikan hambatan terhadap pemenuhan syarat sahnya suatu kontrak yang berakibat dari keabsahan terhadap kontrak tersebut, dimana kemungkinan terjadi perbedaan mengenai apa yang dinyatakan dengan sebenarnya.

2. Yurisdiksi

Jika terjadi permasalahan dalam kontrak *e-commerce* sama-sama warga negara Indonesia tidaklah terlalu masalah karena memiliki sistem hukum yang sama. Akan tetapi jika terjadi kontrak *e-commerce* beda warga negara maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena setiap negara mempunyai sistem hukum sendiri-sendiri. Sehingga jika terjadi

sengketa antar pihak yang berlainan negara maka akan menimbulkan hambatan dalam pemilihan hukum negara mana yang akan digunakan. Oleh sebab itu tidak dapat diabaikan begitu saja masalah yurisdiksi ini, sehingga harus dibicarakan ketika pembentukan kontrak.

3. Kebenaran Data

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam sebuah kontrak atau perjanjian, yaitu sebagai berikut: (a) Identitas para pihak, (b) Tanda tangan para pihak yang diperkuat dengan materai, (c) saksi dalam kontrak tersebut.

Pada saat terjadi kontrak *e-commerce* semua ketentuan di atas tidak jelas, misalnya identitas para pihak dapat dipalsukan karena para pihak yang mengadakan kontrak di dunia maya tersebut tidak pernah bertemu muka secara langsung, tanda tangan para pihak juga tidak asli, karena tidak mungkin dilakukan, apalagi saksi jelas tidak ada. Padahal jika kontrak tersebut bermasalah, maka yang dibuktikan kebenarannya dan juga dicari oleh hakim adalah kebenaran data para pihak yang mengadakan kontrak.

4. Keabsahan (*validity*)

Keabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembentukan kontrak, karena dengan keabsahan tersebut kontrak yang telah disepakati mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Pada kontrak *e-commerce* jauh berbeda dengan kontrak konvensional yang menggunakan kertas sebagai media, sedangkan kontrak dalam *e-commerce* termasuk kontrak elektronik yang menggunakan data digital sehingga untuk pembubuhan tanda tangan di atas materai tidak mungkin

untuk dilaksanakan. Karena tidak ada tanda tangan, maka keabsahan suatu kontrak yang telah dibuat diragukan. Hal ini dapat menyusahkan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik.

5. Kerahasiaan

Tidak semua orang yang mengadakan kontrak mau dipublikasikan isi perjanjiannya, terutama masalah data. Dalam melakukan kontrak secara elektronik, kerahasiaan sangat sulit ditutupi, karena data yang dibuat dalam kontrak sangat mudah diketahui oleh orang lain. Ini merupakan salah satu kelemahan dalam *e-commerce* dan sangat sulit untuk ditutupi.

G. Pemecahan Masalah

Permasalahan atau kelemahan-kelemahan dalam kontrak *e-commerce* ini harus dicarikan solusinya, karena *e-commerce* adalah perkembangan terbaru dalam dunia bisnis yang banyak memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan transaksi konvensional. Ada beberapa hal yang penulis kemukakan disini sebagai pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Kecakapan para pihak.

Salah satu syarat dalam perjanjian adalah para pihak harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini dibuktikan dengan usia yang sudah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Proses kontrak yang dilakukan dengan *e-commerce* terjadi dalam dunia maya dan tidak mempertemukan para pihak secara langsung, ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dikhawatirkan para pihak masih berada dibawah umur.

Untuk mengatasi permasalahan di atas dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya (1) para pihak yang melakukan kontrak harus mencantumkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau scanner KTP, alasannya adalah bila orang tersebut mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) berarti dia sudah dewasa. Karena salah satu persyaratan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah orang tersebut harus dewasa dan sehat akal pikirannya. Jika para pihak tidak mempunyai KTP maka dapat digantikan dengan identitas lain seperti (2) Surat Ijin Mengemudi (SIM). Jika seseorang mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) ini menandakan bahwa dia sudah dewasa dan sehat akal pikirannya.

2. Yurisdiksi

Kontrak *e-commerce* dapat dilakukan oleh antar sesama negara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang dilakukan oleh para pihak yang berlainan kewarganegaraan, misalnya seorang warga negara Indonesia melakukan kontrak dengan orang yang berkebangsaan Jerman atau Amerika Serikat. Kalau saja kontrak *e-commerce* yang mereka lakukan berjalan dengan lancar tentunya tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi jika sekiranya salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perikatan tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan yaitu hukum negara mana yang akan dipakai.

Permasalahan yuridiksi ini harus diatasi dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak yang melakukan perikatan. Pada saat hendak melakukan kontrak *e-commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hukum, yakni hukum mana

yang dipakai oleh para pihak jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan *e-commerce*. Penentuan pilihan hukum pada awal terjadinya kontrak dapat menghindari sengketa jika terjadi permasalahan dikemudian hari. Karena menurut undang-undang ontrak yang disepakati oleh para pihak akan menjadi undang-undang yang akan mengikat kedua belah pihak dan kesepakatan dalam menentukan pilihan hukum tersebut dapat dijadikan dasar kuat berlakunya hukum atas kontrak yang telah dilakukan.

3. Kebenaran Data

Keotentikan data dalam transaksi *e-commerce* sangat penting karena ini termasuk salah satu keabsahan dalam kontrak, oleh sebab itu masalah ini harus dapat dijaga dan dicarikan solusinya. Untuk mengatasi masalah ini, para pihak dapat menggunakan teknologi yaitu kriptografi (*cryptography*). Kriptografi adalah proses yang membahas keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandikan data informasi yang dikirimkan.

4. Keabsahan (*validity*)

Keabsahan data sangat penting dalam sebuah kontrak, dalam transaksi *e-commerce* biasanya tanda tangan dilakukan dengan *digital signature*, praktik seperti ini tentu saja berbeda dari kebiasaan dalam kontrak konvensional. Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan dasar dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan sebagai jaminan terhadap penggunaan data digital. Pada pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa: "Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam

mikrofilm atau media lainnya". Maksud dari media lainnya adalah media yang tingkat pengamanan menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditranspormasikan, misalnya *Compack Disk Read Only Memeory* (CD ROM) dan *Write-Once-Read-Many* (WORM), dimana pengalihan bentuk ke dalam CD ROM yang menggunakan data digital. Praktik seperti ini dapat menjamin keabsahan data yang dikirimkan, sehingga para pihak yang melakukan kontrak dengan *e-commerce* tidak merasa was-was.

5. Kerahasiaan

Kerahasiaan data sangat penting dalam praktik *e-commerce*, karena para pihak ingin menjaga data-data keuangan perusahaan, informasi perkembangan produksi, daftar harga, daftar pelanggan, dan lain-lainnya. Untuk mengatasi masalah ini dapat menggunakan teknologi *Secure Socket Layer* (SSL) yang dibenamkan pada mesin *browser* seperti *internet explorer*, karena cara seperti ini dapat menjamin kerahasiaan data.

Pada perkembangan sekarang ini telah ada lembaga penerbit kunci publik dan kunci privat ini dikeluarkan oleh suatu badan yang bernama *Certification Authority* (CA), lembaga ini dapat memberikan jasa terhadap perlindungan kerahasiaan data.

H. Penutup

Transaksi Elektronik yang sering dikenal dengan *Electronic Commerce* atau *e-commerce* adalah salah satu cara yang banyak memberikan kemudahan kepada para pihak dalam melakukan transaksi yang menggunakan teknologi internet. Cara ini sangat cocok diterapkan pada masa modern ini, karena zaman modern

identik dengan kesibukan yang luar biasa, sehingga orang tidak ada waktu untuk bertemu muka dalam melakukan transaksi.

Dibalik banyak kemudahan praktik *e-commerce* juga ada kekurangan-kekurangannya, seperti mudah terjadi penipuan, kurang terjaminnya kerahasiaan, sulitnya mengetahui identitas para pihak yang sesungguhnya. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah harus membuat aturan-aturan hukum yang baru lagi dengan tujuan untuk melindungi para pihak dalam melakukan kontrak, sehingga para pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan *e-commerce* merasa aman.

Purba, Onno W., *Mengenal E-commerce*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2000

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1973

-----, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991

DAFTAR PUSTAKA

Nogroho, Adi, *Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, Bandung: Informatika, 2006

Barakatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Fuady, Anwar, *Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global"*, Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 2005

Haris Faulidi, Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2004

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994

Makarin, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985